

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pengembangan kurikulum merupakan salah satu kebutuhan utama dalam mempersiapkan dan mendukung laju perkembangan pendidikan di Indonesia, terutama jenjang pendidikan tinggi yakni diantaranya melalui kemampuan pengelola Institusi untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK), pembaharuan undang-undang, peraturan pemerintah, dan kondisi sosial masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pengembangan kurikulum meliputi tujuan, isi, proses pembelajaran, dan evaluasi harus didasarkan pada landasan filosofis, psikologis, sosiologis serta IPTEK. Selain itu, pengembangan kurikulum harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip relevansi baik antara komponen-komponen kurikulum maupun relevansinya dengan tuntutan perkembangan IPTEK, juga perkembangan kebutuhan masyarakat, prinsip efektivitas, efisiensi, kontinuitas, dan fleksibilitas.

Menyikapi keadaan pengembangan dan pembaharuan peraturan, undang-undang dan kurikulum yang sedang bergulir akhir-akhir ini, terutama pada jenjang pendidikan tinggi, dimana ada pemberitahuan yang mengatakan bahwa setiap Program Studi pada Perguruan Tinggi di Indonesia diwajibkan untuk menyusun rencana kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum dengan mengacu kepada Kerangka Kualitas Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian

pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Setiap perguruan tinggi wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut.

Instruksi nasional diatas tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 73 tahun 2013 tentang penerapan KKNI bidang pendidikan tinggi. Peraturan pemerintah ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 dijelaskan bahwa KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Secara Yuridis menjabarkan bahwa setiap Program Studi yang ada pada masing-masing Perguruan Tinggi wajib menerapkan kurikulum berbasis KKNI, yaitu sebagaimana tertuang dalam pasal 29 UU Dikti 12/2012 dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI kemudian dituangkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1.

Perguruan Tinggi sebagai salah satu institusi pendidikan, mempunyai tujuan membentuk sarjana-sarjana yang berakhlak mulia, berilmu dan cakap, serta mempunyai kesadaran untuk bertanggung jawab atas kesejahteraan umat dan masa depan bangsa, sesuai dengan keahliannya, serta untuk memenuhi keperluan umum. Tujuan ini kemudian dituangkan dan

dikembangkan dalam tugas pokok yang dimaksud adalah bahwa perguruan tinggi merupakan bagian Integral dari pembangunan nasional yang menjadi mediator antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Persoalan yang muncul seputar penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana kritik banyak pihak berkisar pada kualitas, potensi, sistem, etos kerja, pendanaan, sarana pendukung, atau persoalan yang berkaitan dengan fungsi dan peranya dalam membangun SDM atau lulusan, kritik tersebut merupakan indikator untuk menentukan standar kualitas perguruan tinggi. Dari beberapa persoalan-persolan utama yang dihadapi perguruan tinggi di atas, ada persoalan yang memerlukan pemecahan yang bersifat segera, antara lain; mutu lulusan dan sumbangan perguruan tinggi terhadap pengembangan keilmuan.

Secara kuantitas, lulusan universitas sudah cukup besar, namun secara kualitas kondisinya masih jauh dari apa yang diharapkan. Mutu lulusan masih dianggap belum memenuhi harapan masyarakat dan kebutuhan dunia Industri kerja dalam negeri terlebih luar negeri.

Keluhan seperti ini meliputi berbagai hal, mulai dari kompetensi yang paling dasar sampai Profesionalitas mereka dalam melakukan pekerjaan. Sehingga pada akhirnya masih banyak lulusan yang belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri kerja, pada akhirnya banyak diantara lulusan universitas belum bekerja. Badan Statistik Negara RI menunjukkan angka pengangguran menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan mulai tahun 2015 sampai dengan 2017, menunjukkan bahwa angka pengangguran tertinggi dipegang oleh lulusan universitas.

No.	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan			
1	Tidak/belum pernah sekolah			
2	Tidak/belum tamat SD			
3	SD			
4	SLTP			
5	SLTA Umum/SMU			
6	SLTA Kejuruan/SMK			
7	Akademi/Diploma			
8	Universitas			
Total				

2015		2016		2017
Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari
124,303	55,554	94,293	59,346	92,331
603,194	371,542	557,418	384,069	546,897
1,320,392	1,004,961	1,218,954	1,035,731	1,292,234
1,650,387	1,373,919	1,313,815	1,294,483	1,281,240
1,762,411	2,280,029	1,546,699	1,950,626	1,552,894
1,174,366	1,569,690	1,348,327	1,520,549	1,383,022
254,312	251,541	249,362	219,736	249,705
565,402	653,586	695,304	567,235	606,939
7,454,767	7,560,822	7,024,172	7,031,775	7,005,262

Gambar 1.1
Pengangguran Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Sumber: Badan Statistik Negara RI Tahun 2015-2017.
<https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/972>

Sumbangan Perguruan Tinggi terhadap pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya dianggap masyarakat masih kurang signifikan. Masyarakat belum melihat perguruan tinggi sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan atau tempat masyarakat mencari solusi apabila ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan agama, apalagi dibidang ilmu pengetahuan, seni dan budaya, serta teknologi. Hasil penelitian perguruan tinggi tentang masalah kemasyarakatan, dan ilmu pengetahuan tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Mungkin memang karena tidak ada, dianggap tidak bermutu, atau kurangnya penyebar luasan hasil penelitian tersebut kepada masyarakat. Berdasarkan uraian dan analisis yang telah

dikemukakan di atas, salah satu faktor yang sering dijadikan sasaran penyebab dan kurang berhasilnya perguruan tinggi dalam mencapai tujuan pokok yang tercantum dalam PP No.60 tahun 1999 adalah faktor kurikulum. Mengingat, kurikulum merupakan rencana pendidikan yang akan diberikan kepada mahasiswa.

Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 35 ayat 2 juga menyebutkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia dan keterampilan.

Dalam telaah Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi, dan peraturan yang paling terbaru mengenai kurikulum pendidikan tinggi dan KKNi yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki 'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNi. Setiap perguruan tinggi wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut.

Disamping itu, globalisasi telah mengakibatkan perubahan keseluruhan kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Untuk itu, pengembangan kurikulum merupakan salah satu strategi untuk pembangunan pendidikan nasional agar lulusan dapat

memiliki Capaian Pembelajaran yang sesuai dengan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang mengacu Pada KKNI.

Laporan penelitian yang dilakukan oleh Syarifuddin.A (2014) dengan judul model penerapan KKNI sebagai penguatan mutu Program Studi Pariwisata dan Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji lebih mendalam tentang standar kompetensi lulusan yang dipersiapkan oleh Prodi Pariwisata dan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, relevansi dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, sebagai wahana dari penerapan KKNI pada Kurikulum kedua Prodi tersebut. Adapun hasil penelitian yang telah dicapai adalah telah terefleksinya kondisi kedua prodi dan perangkat-perangkat kurikulum dan lebih lanjut dilakukan penyesuaian kompetensi lulusan dan kompetensi yang dibutuhkan lapangan kerja, sebagaimana yang telah ditekankan oleh KKNI. Rancangan Model Penerapan Kurikulum berbasis KKNI, sebagaimana telah dirumuskan dalam penelitian ini, diperkuat dengan rancangan Implementasi Manajemen Program Studi berbasis Akreditasi dan dirumuskan dalam suatu sistem pengelolaan prodi yang utuh, komprehensif, sistematis, dan terukur serta dilandasi dengan evaluasi diri dan rencana strategis pengembangan Prodi yang berkualitas dan berdaya saing. Visi kedua program studi sudah berorientasi kepada peningkatan kualitas dan profesionalitas yang beruang lingkup pada Tridharma Perguruan Tinggi, namun dalam penelitian ini masih ditemukan catatan penting yang perlu ditindaklanjuti oleh kedua Program studi tersebut, yakni untuk Prodi Pendidikan Bahasa Inggris faktor daya saing pada level geografis tertentu masih samar-samar, agar lebih menantang, memotivasi dan menginspirasi, maka perlu dioptimalkan dalam rumusan Visi Prodi tersebut. Sementara untuk Prodi Pariwisata profesionalitas pada lulusan masih perlu dikentalkan dalam formulasi Visi Program Studi tersebut sehingga wujud *Learning Outcomes*/Capaian Pembelajaran betul-betul tampak dan terukur, seperti hal nya pada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris.

Ali Akbar Jono (2016) sebuah Jurnal Penelitian yang dilakukan di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Kota Bengkulu yang

berjudul Studi Implementasi Kurikulum Berbasis KKNI pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di LPTK se-kota Bengkulu, pada penelitian tersebut menyebutkan bahwa KKNI adalah salah satu rujukan nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa Indonesia di sektor sumber daya manusia melalui pencapaian kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang dihasilkan oleh sistem pendidikan dan sistem pelatihan kerja nasional, serta sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prospek dan kesiapan beberapa perguruan tinggi di kota Bengkulu yang berposisi sebagai LPTK, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris terhadap wacana pemberlakuan kurikulum berbasis KKNI yang efektif akan diberlakukan pada tahun akademik 2016/2017. Disamping itu penelitian ini bertujuan menjadi sarana penemuan solusi terhadap kendala yang menjadi rintangan dari pemberlakuan kurikulum berbasis KKNI. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa kelima LPTK yang menyelenggarakan program studi pendidikan bahasa Inggris pada prinsipnya siap melakukan pemberlakuan kurikulum berbasis KKNI pada tahun akademik 2016/2017, akan tetapi efektifitas penerapan kebijakan ini seyogya dibarengi dengan kesiapan semua perangkat yang dibutuhkan termasuk kebijakan pengembangan kurikulum tertulis dari masing-masing institusi secara permanen. Dari lima LPTK yang ada, hanya satu yakni FKIB-UNIB yang telah menerapkan Kurikulum berbasis KKNI dan berjalan baik sedangkan yang lain masih dalam proses finalisasi Struktur Kurikulum yang diharapkan.

Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) mengatakan Sebagai upaya mendorong terwujudnya penerapan Kurikulum Pendidikan Tinggi di seluruh perguruan tinggi, Direktorat Pembelajaran Ditjen Belmawa mengadakan Workshop Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang diikuti oleh 102 (seratus dua) perguruan tinggi. Masing-masing perguruan tinggi diwakili oleh 1 (satu) orang tim pengembangan kurikulum pendidikan tinggi.

Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi.

Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan berorientasi pada KKNI dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) pada tahun 2016 ini telah merancang sejumlah program terkait dengan pengembangan dan penerapan kurikulum pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Penerapan kurikulum pendidikan tinggi tersebut diharapkan dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang bermutu dan relevan dengan pembangunan nasional termasuk kebutuhan tenaga terdidik dan terampil di dunia industri.

Workshop ini dimaksudkan untuk peningkatan mutu pembelajaran pendidikan tinggi yang bermuara pada peningkatan mutu lulusan. dan terwujudnya forum komunikasi antar program studi dan saling berbagi pengalaman dibidang penyusunan kurikulum, serta sebagai upaya memotret permasalahan yang menghambat Implementasi Kurikulum KKNI dan SN Dikti di Perguruan Tinggi. *Workshop* yang dipandu oleh Tim Pengembang Kurikulum Pendidikan Tinggi Ditjen Belmawa ini menjadi sangat penting untuk dilaksanakan karena *Output* yang dihasilkan dari *Workshop* ini selain akan menjadi rekomendasi kebijakan pimpinan, akan dipergunakan sebagai referensi dan bahan analisis dalam penyusunan kurikulum setiap program studi di perguruan tinggi masing.

Kegiatan ini dibuka oleh Kasubdit Pembelajaran Khusus Dr. Ridwan Roy Tutupoho yang mewakili Direktur Pembelajaran Ditjen Belmawa. Dalam sambutan dan arahannya, Ridwan antara lain menyampaikan , ”bahwa dalam menghadapi tantangan dan persaingan global, ratifikasi Indonesia di berbagai konvensi Internasional serta menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) penerapan kurikulum berorientasi SN Dikti dan KKNI harus segera dilaksanakan”. Didalam *workshop* ini, selain disajikan materi sebagai pengayaan dari para tim pengembang kurikulum dengan topik Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester, dan Strategi Pembelajaran, serta Format contoh

Penyusunan Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) mengacu pada SN Dikti dan KKNI, juga dilanjutkan dengan diskusi yang cukup interaktif. Setelah para peserta mendapatkan pengetahuan tentang sistematika penyusunan kurikulum pendidikan tinggi, maka dilanjutkan dengan sesi menyusun dan menyajikan kurikulum dari masing masing Program Studi para peserta.

Hasil pengamatan selama workshop ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman peserta tentang penyusunan kurikulum pendidikan tinggi berorientasi KKNI masih belum merata, penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengacu SN Dikti masih bertaraf mencoba dan hanya sesuai format tetapi belum ada esensi pembelajarannya. Tindak lanjut dari workshop ini diharapkan agar setiap peserta segera menerapkan kurikulum mengacu SN Dikti. Direktorat Jenderal Belmawa akan lebih intensif melakukan sosialisasi dan diseminasi serta pelatihan secara berkelanjutan, dan menyusun panduan ringkas tentang penyusunan kurikulum pendidikan tinggi, capaian pembelajaran/*learning outcomes* serta *Quality Assurance*. <http://belmawa.ristekdikti.go.id/> (2016)

Berdasarkan Informasi yang berhasil penulis rangkum pada saat melakukan pra penelitian yaitu dengan observasi mengunjungi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI) dan berdiskusi dengan kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Ibu Rachmawati Windyaningrum, M.Ikom mengungkapkan bahwa UNIBI merupakan penggabungan dari dua kampus yaitu Politeknik Ganesha Bandung dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pelita Nusantara.

UNIBI yang dipimpin oleh Dr. Ir. Bob Foster, M.M., didirikan dengan tujuan menghasilkan pengusaha-pengusaha muda (*Young Entrepreneur*) serta memenuhi tuntutan akan tenaga Ahli Madya dan Sarjana profesional yang berjiwa *entrepreneur* di bidang teknologi, komunikasi, seni, psikologi, dan bisnis. Sebagai Universitas pertama yang mempunyai slogan berwawasan *entrepreneur* di Indonesia, UNIBI telah merancang kurikulum dan metode perkuliahan secara khusus berupa kuliah *entrepreneurship*,

wawasan IT mutakhir, peluang bisnis, dan sejak dini menanamkan semangat *entrepreneurship*.

UNIBI merupakan Universitas yang tergolong masih baru, namun meski demikian antusiasme masyarakat sangat baik terhadap kehadiran Universitas ini bisa dilihat dari jumlah mahasiswa yang mendaftar menjadi mahasiswa UNIBI, hal ini dikarenakan UNIBI menyediakan program studi yang sesuai dengan kebutuhan industri dunia kerja yang sedang *Trend* dan berkembang di masyarakat saat ini, namun meski demikian ibu Rachmawati W, M.Ikom menuturkan bahwa masih belum optimal dalam menerapkan kurikulum berbasis KKNI khususnya di Program Studi Ilmu Komunikasi, hal tersebut dikarenakan Program Studi Ilmu Komunikasi baru menerapkan kurikulum KKNI ini pada tahun ajaran 2016/2017 dikarenakan berbagai hal yang mempengaruhi dalam implementasi kurikulum KKNI diantaranya adalah kurangnya sumber daya manusia yang mengelola bidang kurikulum dan perpindahan lokasi kampus dari jln. Purnawarman ke jln. Soekarno Hatta kota Bandung sehingga harus memperbaharui sistem dan manajemennya.

UNIBI memiliki empat Fakultas yaitu Fakultas Teknologi dan Informasi terdiri dari Program Studi D3 Manajemen Informatika, D3 Teknik Informatika, D3 Komputerisasi Akuntansi, S1 Perangkat Lunak dan S1 Sistem Informasi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri dari Program Studi S1 Manajemen Bisnis dan S1 Akuntansi. Fakultas Psikologi terdiri dari Program Studi S1 Psikologi. Fakultas Komunikasi dan Desain terdiri dari Program Studi S1 Ilmu Komunikasi dan S1 Desain Komunikasi Visual.

Dari beberapa informasi diatas peneliti ingin melihat penyelenggaraan kurikulum khususnya kurikulum berbasis KKNI yang dilakukan oleh UNIBI.

Dari keempat Fakultas tersebut peneliti sangat tertarik dengan Fakultas Komunikasi dan Desain khususnya Program Studi S1 Ilmu Komunikasi hal ini dikarenakan, Program Studi S1 Ilmu Komunikasi merupakan Program Studi baru namun sudah menjadi Program Studi favorit, ditambah dengan Visi dan Misi dari Program Studi Ilmu

Komunikasi UNIBI, dan belum optimalnya penyelenggaraan kurikulum KKNI yang dilakukan oleh Program Studi Ilmu Komunikasi dikarenakan berbagai faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kurikulum KKNI. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui lebih jauh mengenai Implementasi Kurikulum berbasis KKNI yang diterapkan pada program studi S1 Ilmu Komunikasi.

Berangkat dari beberapa informasi yang berhasil penulis kumpulkan pada paragraf sebelumnya terkait UNIBI khususnya Program Studi S1 Ilmu Komunikasi terhadap penyelenggaraan kurikulum KKNI, ditambah laporan penelitian terdahulu diantaranya yang dilakukan di Bengkulu tahun 2016 menyebutkan dari lima LPTK yang ada, hanya satu LPTK yaitu FKIB-UNIB yang telah menerapkan kurikulum KKNI dan berjalan baik sedangkan yang lain masih dalam proses finalisasi struktur kurikulum yang diharapkan, kemudian data BPS tahun 2017 menunjukkan angka pengangguran lulusan perguruan tinggi adalah yang paling tinggi hal tersebut menunjukkan bahwa mutu lulusan belum memenuhi kebutuhan dunia kerja di Indonesia, dari hasil workshop terkait KKNI yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Ditjen Belmawa) pada tahun 2016, bahwa pemahaman peserta tentang penyusunan kurikulum pendidikan tinggi berorientasi KKNI masih belum merata, penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mengacu SN Dikti masih bertaraf mencoba dan hanya sesuai format tetapi belum ada esensi pembelajarannya, ditambah dengan pemberlakuan undang-undang dan peraturan pemerintah bahwa setiap program studi yang ada pada masing-masing perguruan tinggi wajib menerapkan kurikulum berbasis KKNI hal tersebut tertuang dalam pasal 29 UU Dikti 12/2012 dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI, kemudian dituangkan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 73 tahun 2013 tentang penerapan KKNI bidang pendidikan tinggi. Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang

Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

Berdasarkan konteks dari hal-hal tersebut di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat Studi Implementasi khususnya Studi Implementasi Kurikulum berbasis KKNi pada Program Studi S1 Ilmu Komunikasi UNIBI

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan diatas, maka tema penelitian disini adalah melakukan kegiatan Studi Implementasi Kurikulum berbasis KKNi pada Program Studi S1 Ilmu Komunikasi UNIBI.

Penelitian ini berusaha melihat dan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana prosedur penyelenggaraan Implementasi Kurikulum berbasis KKNi pada Program Studi S1 Ilmu Komunikasi UNIBI sebagai wahana penerapan KKNi dalam mematuhi aturan pemerintah dan untuk mengantarkan ketercapaian visi misi dan tujuan Program Studi Ilmu Komunikasi UNIBI melalui capaian pembelajaran/*Learning Outcome*.

Untuk memperjelas bahasan diatas, maka diuraikan beberapa rumusan pertanyaan dibawah ini :

1. Bagaimana prosedur perencanaan Implementasi Kurikulum berbasis KKNi pada Program Studi S1 Ilmu Komunikasi UNIBI ?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan Implementasi Kurikulum berbasis KKNi pada Program Studi S1 Ilmu Komunikasi UNIBI ?
3. Bagaimana prosedur evaluasi Implementasi Kurikulum berbasis KKNi pada Program Studi S1 Ilmu Komunikasi UNIBI ?
4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Implementasi Kurikulum berbasis KKNi pada Program Studi S1 Ilmu Komunikasi UNIBI ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang bagaimana prosedur penyelenggaraan Implementasi Kurikulum berbasis KKNi pada Program Studi S1 Ilmu Komunikasi UNIBI sebagai wahana penerapan KKNi dalam mematuhi aturan pemerintah dan untuk mengantarkan ketercapaian visi misi dan tujuan Program Studi Ilmu Komunikasi UNIBI melalui capaian pembelajaran/*Learning Outcomes*

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk

1. Memberikan gambaran prosedur perencanaan Implementasi Kurikulum berbasis KKNi pada Program Studi S1 Ilmu Komunikasi UNIBI.
2. Memberikan gambaran prosedur pelaksanaan Implementasi Kurikulum berbasis KKNi pada Program Studi S1 Ilmu Komunikasi UNIBI.
3. Memberikan gambaran prosedur evaluasi Implementasi Kurikulum berbasis KKNi pada Program Studi S1 Ilmu Komunikasi UNIBI.
4. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Implementasi Kurikulum berbasis KKNi pada Program Studi S1 Ilmu Komunikasi UNIBI.

D. Manfaat Penelitian

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan tentang Pengimplementasian Kurikulum berbasis KKNi sebagai kerangka acuan dalam menerapkan sebuah pola Kurikulum yang terintegrasi, antara kurikulum dengan ketercapaian Visi Misi dan Tujuan Program Studi yang dituangkan kedalam RPS, rancangan capaian pembelajaran (*Learning Outcome*) dan SKPI khususnya bidang Ilmu Komunikasi.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan yang berguna dalam pengembangan kurikulum khususnya kepada :

1. **Lembaga Yang Diteliti (Program Studi S1 Ilmu Komunikasi UNIBI)**

Penelitian ini sekiranya dapat dijadikan masukan bagi Civitas Akademika Program Studi S1 Ilmu Komunikasi UNIBI dalam mengembangkan perangkat kurikulum khususnya terkait Implementasi Kurikulum berbasis KKNI dan dapat memberikan kontribusi positif kepada lembaga. Selain itu juga sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijaksanaan yang tepat dalam penyelenggaraan Implementasi Kurikulum, dalam merancang RPS, rancangan Capaian Pembelajaran/*Learning Outcome* dan SKPI yang berkaitan dengan peraturan pemerintah pada jenjang pendidikan tinggi khususnya KKNI

2. **Program Studi Pengembangan Kurikulum**

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan Ilmu Pendidikan khususnya Pengembangan Kurikulum dalam konteks Implementasi Kurikulum yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan tinggi dan berbasis KKNI

3. **Peneliti**

Memperdalam wawasan pengetahuan serta menjawab rasa keingintahuan peneliti mengenai Implementasi Kurikulum berbasis KKNI pada Program Studi S1 Ilmu Komunikasi UNIBI.

E. Struktur Organisasi Tesis

Struktur organisasi Tesis berisi rincian tentang urutan penulisan dari setiap bab dan bagian bab dalam Tesis, mulai dari bab I hingga bab V.

Bab I berisi uraian tentang pendahuluan dan merupakan bagian awal dari Tesis yang terdiri dari :

1. Latar Belakang Penelitian
2. Rumusan Masalah Penelitian
3. Tujuan Penelitian
4. Manfaat Penelitian
5. Struktur Organisasi Tesis

Bab II berisi uraian tentang Landasan Teoritis. Landasan Teoritis mempunyai peran yang sangat penting, landasan teoritis berfungsi sebagai *the state of the art* dalam menyusun permasalahan penelitian, tujuan penelitian, pemaparan landasan teoritis harus bersifat analitis dan sumatif, mencakup isu-isu metodologis, teknik penelitian dan juga topik yang berkaitan.

Bab II terdiri dari :

1. Pembahasan Teori–teori dan konsep, hukum–hukum, model–model serta turunannya dalam bidang yang dikaji.
2. Penelitian yang terdahulu yang relevan dengan bidang yang diteliti, termasuk prosedur, subjek dan temuannya.
3. Posisi teoritis peneliti yang berkenaan dengan masalah yang diteliti

Bab III berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian yang terdiri dari :

1. Desain Penelitian (Metode Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif)
2. Partisipan dan tempat penelitian
3. Pengumpulan data
4. Analisis Data

Bab IV berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan hasil penelitian yang terdiri :

1. Pemaparan data penelitian (profil lembaga, profil lulusan, perangkat Kurikulum diantaranya pemetaan mata kuliah, sebaran mata kuliah, Rancangan *Learning Outcome*, ijazah dan SKPI)
2. Pengumpulan hasil Instrumen Penelitian (Angket wawancara tersruktur, observasi lapangan dan Telaah Dokumen) Analisis data penelitian
3. Pembahasan hasil penelitian

Bab V menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian. Ada dua alternatif cara penulisan simpulan dan rekomendasi, yakni dengan cara butir demi butir atau dengan uraian padat, bab V terdiri dari :

1. Simpulan
2. Rekomendasi